

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjarangan

Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan

Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice
Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / *Articles*

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance*..... 311-321
Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines*..... 323-331
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan*..... 333-344
Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta*..... 345-357
Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung*..... 359-368
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / *Interview*

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy*..... 369-374
Abby Gina

Kata Makna / *Words and Meaning*

Nur Iman Subono 375-376

Profil / *Profile*

Masnua, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnua, Fisherwomen Rights Defender*..... 377-383
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / *Book Review*

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights*..... 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan

Fisherwomen

“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis,

tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk “*champions*” (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia.

(Anita Dhewy)

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: existence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Indonesia)

**Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi
Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium
dan Kamal Muara, Penjaringan**

***Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and
Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium
and Kamal Muara Village, Penjaringan***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar
pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggeser para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah

tangga nelayan akan tergeser dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian
Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

**Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan
Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke,
Jakarta Utara**

***Productive, Reproductive and Community Roles of Women
Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2
gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolaan. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability

categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum



Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan

Masnuah, Fisherwomen Rights Defender

Andi Misbahul Pratiwi

Jurnal Perempuan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com

*“Saya anak nelayan, sedari kecil hingga sekarang saya hidup di lingkungan masyarakat nelayan, saya melihat bahwa keterpurukan perempuan nelayan belum ada perubahan, melihat kondisi itu Puspita Bahari ingin membuat perubahan kecil”
(Masnuah, 3 September 2017)*

Mbak Nuk, panggilan akrab Masnuah, adalah pendiri organisasi perempuan nelayan, Puspita Bahari yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Pusat. Melihat kondisi perempuan nelayan yang

hidup dalam lingkaran kemiskinan dan kekerasan membuat hati Masnuah tergerak untuk melakukan perubahan. Pada tahun 2005 ia bersama-sama dengan 30 orang perempuan nelayan mendirikan Puspita Bahari. Organisasi perempuan nelayan di Kabupaten Demak tersebut lahir dengan semangat untuk memerdekakan perempuan nelayan dari kungkungan budaya patriarki, memberdayakan ekonomi dan memberikan akses pelayanan publik kepada perempuan nelayan. Menurut Mbak Nuk, perempuan nelayan mengalami multibeban yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan akses

pendidikan, ekonomi dan otonomi atas tubuh. Merefleksikan pada perjalanan hidupnya, perempuan kelahiran Rembang 4 Juli 1974 tersebut mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mendirikan Puspita Bahari adalah bentuk pemberontakan atas segala ketidakadilan yang terjadi pada hidupnya dan perempuan di sekelilingnya. Atas kerja kerasnya berjuang untuk perempuan nelayan di pesisir, Masnuah menerima Frans Seda Awards 2014 karena dinilai telah berjasa memperjuangkan hak kaum perempuan, terutama di Kabupaten Demak.

Aktivisme Puspita Bahari

Pada masyarakat patriarki, perempuan yang melakukan kegiatan sosial, berorganisasi dan menuntut hak-haknya bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan baik. Pada awal berdirinya Puspita Bahari, Mbak Nuk sebagai sosok sentral penggerak Puspita Bahari mendapatkan label negatif sebagai perempuan '*gak bener*', karena dianggap mengajak perempuan untuk meninggalkan kodratnya. Masyarakat sekitar masih menganggap bahwa kodrat perempuan ialah memasak, mencuci, menyiapkan makanan, menjaga rumah dan mengurus suami. Pada saat itu pengetahuan perempuan lulusan sekolah dasar ini sudah sangat progresif, ia mencoba menjelaskan pada kader-kader Puspita Bahari bahwa apa yang selama ini dianggap kodrat oleh masyarakat adalah peran gender yang dikonstruksi oleh masyarakat. Menurutnya bentuk ketimpangan gender di dalam masyarakat pesisir sangat banyak, perempuan nelayan dan istri nelayan harus bertanggung jawab atas ketersediaan makanan di meja, uang jajan anak dan semua kebutuhan rumah tangga dari hasil tangkapan suami, berapapun hasilnya, bahkan jika tidak tercukupi perempuanlah yang harus berutang.

Program pertama Puspita Bahari ialah melakukan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan nelayan, perempuan kepala keluarga, dan perempuan korban kekerasan. Kegiatan ekonomi yang dibangun dan dikembangkan oleh Puspita Bahari adalah aktivitas pascaproduksi bidang ekonomi, yakni membuat kerupuk ikan, tepung ikan, terasi, ikan asin, pengasapan dan makanan-makanan dari hasil laut. Aktivitas ekonomi yang dilakukan Puspita Bahari telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir Demak. Bagi Mbak Nuk, perempuan nelayan pertamanya harus diberdayakan secara ekonomi, sehingga mereka dapat independen dan tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan. Program Puspita Bahari sendiri dimulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan yaitu mengajak para istri nelayan untuk mengolah hasil

tangkapan suami, memproduksi ikan kering, kerupuk ikan, intip dan berbagai bentuk olahan hasil laut maupun dari sumber daya alam yang ada di sekitar. Pada musim paceklik, Puspita Bahari juga turut menyalurkan 'tabungan sembako' pada perempuan nelayan. Puspita Bahari juga membantu perempuan di pesisir untuk mendapatkan layanan publik seperti membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan Kartu Indonesia Sehat. Menurut Masnuah masyarakat nelayan mayoritas berada dalam garis kemiskinan, sehingga perlu dibantu untuk mengakses pelayanan publik secara gratis. Ia menceritakan bahwa ketika ada perempuan nelayan yang harus melakukan operasi cesar di rumah sakit, maka prosesnya dari tingkat desa hingga ke rumah sakit didampingi Puspita Bahari.

Sebagai organisasi perempuan nelayan satu-satunya di Morodemak sebelum kehadiran PPNI (Persaudaran Perempuan Nelayan Indonesia) Demak, Puspita Bahari mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan kepada perempuan nelayan. Puspita Bahari pernah menerima bantuan 3 perahu dari Dompot Dhuafa yang kemudian diserahkan kepada suami dari anggota Puspita Bahari. Namun pada saat itu karena relasi kuasa yang timpang muncul persoalan terkait kepemilikan perahu yang seharusnya ada pada kader Puspita Bahari namun diklaim menjadi milik para suami. Pada saat konflik tersebut, Masnuah yang akhirnya memperjuangkannya karena kader Puspita Bahari enggan berkonflik dengan suami mereka. Kejadian tersebut menjadi catatan penting bagi Masnuah bahwa masih ada ketimpangan relasi gender di dalam keluarga nelayan, pergi melaut dianggap pekerjaan laki-laki sehingga perahu dianggap simbol maskulinitas yang harus dimiliki laki-laki bukan perempuan.

Bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Puspita Bahari ialah bantuan permodalan dari Kementerian Sosial RI untuk perempuan korban kekerasan dampingan Puspita Bahari. Kemudian berbagai jenis bantuan lainnya pun kini dipercayakan pada Puspita Bahari seperti bantuan kursi roda, alat bantu dengar dan bantuan sosial untuk nelayan lanjut usia. Bahkan ketika ada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi, Puspita Bahari lah satu-satunya organisasi yang diberikan kepercayaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan pendampingan.

Aktivisme yang dilakukan Puspita Bahari bukanlah tanpa melalui proses pembelajaran. Masnuah menjelaskan bahwa selama 15 tahun ini yang dilakukan Puspita Bahari adalah tidak berhenti untuk belajar, sehingga

kapasitas mereka untuk melakukan pemberdayaan dapat terus meningkat. Pada tahun 2006 Puspita Bahari belajar banyak tentang advokasi kebijakan dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Kemudian tahun 2007 Puspita Bahari didukung oleh Yayasan Lintas Agama dan Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani Nelayan (LPUBTN) untuk pelatihan ekonomi, produk berkualitas, mengolah koperasi dan manajemen keuangan. Pada tahun yang sama juga organisasi perempuan nelayan Demak itu mendapat dukungan dari Layan Nusantara dan LBH Semarang untuk melakukan investigasi dan advokasi ketika ada kasus nelayan yang ditangkap karena melawati batas wilayah atau ketika nelayan mengalami kecelakaan. Kemudian berlanjut pada tahun 2008 Puspita Bahari mendapatkan pelatihan paralegal dari LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Semarang. Di tahun 2009, Puspita Bahari bertemu dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang memiliki program untuk memberdayakan masyarakat pesisir termasuk perempuan nelayan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010 untuk pertama kalinya wadah perempuan nelayan dibentuk di tingkat nasional, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Kepengurusan di tingkat pusat terdiri dari 16 anggota PPNI yang tersebar di 11 provinsi—ia pun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Pusat. Lembaga-lembaga tersebut menurut Masnuah mendukung kegiatan Puspita Bahari dalam proses pembelajaran advokasi nelayan dan pendampingan perempuan KDRT.

Pada setiap perjuangan kendala-kendala pasti terjadi. Menurut Masnuah yang menjadi kendala Puspita Bahari hingga kini adalah cara pandang masyarakat yang masih bias. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa gerakan perempuan nelayan sebagai hal yang negatif. Pemerintah desa pun demikian, masih sulit untuk mendukung kader Puspita Bahari dalam memberikan akses pelayanan publik ke masyarakat. Menurut Masnuah, perlahan-lahan masyarakat mulai berubah, dan kini pemerintah desa pun sudah cukup kooperatif dengan kader-kader Puspita Bahari yang membantu masyarakat miskin untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di kantor desa. Keberadaan Puspita Bahari kini pun mulai diakui oleh pemerintah daerah di Kabupaten Demak, beberapa dinas mulai membuka komunikasi dengan Puspita Bahari. Masnuah menjelaskan bahwa ada kepercayaan dari pemerintah maupun lembaga sosial pada Puspita Bahari untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Ia menceritakan bahwa pada awal berdirinya Puspita Bahari sangat sulit mendapat kepercayaan tersebut, beberapa kali mengirim

proposal namun tidak kunjung mendapatkan respons. Hingga kini akhirnya dinas-dinas yang justru berkunjung ke sekretariat Puspita Bahari dan mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan Puspita Bahari membuka mata masyarakat bahwa penting untuk melakukan pemberdayaan pada perempuan nelayan.

Perjuangan Masnuah bersama Puspita Bahari mendobrak dinding patriarki bukanlah hal mudah. Ia mengakui bahwa sebagai perempuan dirinya sering dicemooh masyarakat, dianggap perempuan genit, perempuan yang suka ikut campur rumah tangga orang lain. Meski demikian, Masnuah dan perempuan nelayan lainnya yang tergabung dalam Puspita Bahari tidak pantang mundur. Kini perjuangan mereka sudah membuahkan hasil, setidaknya masyarakat sudah mengakui dan menyadari bahwa Puspita Bahari adalah organisasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bagi Masnuah perubahan sekecil apapun sangat berharga baginya. Kini anggota Puspita Bahari sudah lebih dari 100 orang dan tersebar di 3 desa di Kabupaten Demak. Anggota Puspita Bahari bervariasi dari berbagai umur, mulai dari remaja, perempuan dewasa, perempuan yang sudah menikah, perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, hingga perempuan lanjut usia. Kebanggaan lainnya adalah ketika ada perubahan dalam pola pikir masyarakat, yang dulu melarang istrinya berorganisasi justru sekarang sangat mendukung. Hal itu menunjukkan bahwa manfaat dari kehadiran Puspita Bahari sudah dirasakan oleh keluarga-keluarga nelayan.

Menyoal Ketidakadilan Gender dan Kekerasan

Pada masyarakat pesisir perempuan dan anak perempuan belum menjadi prioritas utama. Pembagian kerja di dalam keluarga masih menggunakan peran gender, perempuan dibebani dengan sejumlah pekerjaan domestik dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan konsumsi dalam rumah tangga. Perempuan juga dibebani untuk mengurus anak-anak di rumah, namun menurut Masnuah dalam berbagai kasus justru pendapat perempuan untuk memajukan pendidikan anak perempuannya diabaikan. Pendidikan anak perempuan di keluarga nelayan belum menjadi prioritas. Masnuah mengungkapkan bahwa anak perempuan masih minim dalam hal akses informasi dan pendidikan, menurutnya masih ada anggapan bahwa perempuan nantinya akan mengurus sumur, dapur dan kasur, jadi tidak perlu sekolah tinggi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi isu yang diperjuangkan oleh Puspita Bahari. Masnuah

sendiri meyakini bahwa KDRT terjadi karena ada relasi yang timpang di dalam keluarga. Pertama kali kasus KDRT yang didampingi oleh Puspita Bahari ialah kasus yang menimpa kader Puspita Bahari sendiri pada tahun 2010. Sebelumnya kader Puspita Bahari pernah mengikuti pelatihan paralegal tahun 2008 oleh LBH APIK Semarang sehingga sudah ada pengetahuan soal advokasi kasus secara prosedural mulai dari tingkat masyarakat, kepolisian, sampai pengadilan. Pada saat mendampingi kader Puspita Bahari yang mengalami KDRT, Puspita Bahari mendapat penolakan keras dari masyarakat karena dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Menurut Masnuah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih dianggap sebagai kewajaran di masyarakat pesisir Demak. Sehingga menurutnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang harus diributkan, dibicarakan dan diusut hingga ke pengadilan. Namun tekad Masnuah dan perempuan korban tersebut sudah bulat, meskipun ada penolakan keras dari masyarakat sekitar, mereka tetap membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya perlu ada pelajaran publik bagi masyarakat sehingga kekerasan tidak berulang. Hal itu bertujuan untuk memberi efek jera pada masyarakat khususnya pada suami yang melakukan kekerasan kepada istri.

Masnuah menceritakan proses advokasi tersebut menghadapi kendala bukan hanya dari masyarakat namun juga dari kepolisian. Ia mengungkapkan bahwa prosesnya sangat alot pada waktu itu sehingga butuh upaya keras untuk membuat pelaku kekerasan tersebut dipidanakan. Pengalaman advokasi kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat membantu Puspita Bahari dalam proses belajar melakukan advokasi kedepannya, selain itu juga menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa segala bentuk tindak kekerasan tidak boleh dilakukan sekaligus mengajarkan masyarakat untuk berani bicara soal kekerasan.

Menurut Masnuah, sejak kasus kekerasan yang pertama kali ditangani oleh Puspita Bahari, kini semakin banyak laporan kasus kekerasan kepada Puspita Bahari. Banyak perempuan yang melapor ketika dianiaya oleh suami, saudara, ataupun kerabat. Puspita Bahari menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat Demak untuk memberikan konsultasi, pendampingan hukum baik kasus perdata maupun pidana. Ia pun tidak heran, karena ia tahu sebenarnya selama ini banyak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga namun banyak perempuan yang enggan melaporkannya karena dianggap aib, sehingga tidak jarang ditemui perempuan yang wajah dan tubuhnya penuh luka-luka

saat melaporkan kasusnya. Menurut Masnuah belum ada kesadaran kritis masyarakat khususnya perempuan terhadap tindak kekerasan. Pada masyarakat nelayan yang hidupnya 'keras', tindak kekerasan dianggap hal yang biasa. Bahkan tak jarang perempuan korban yang justru menyalahkan dirinya sendiri karena dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.

Persoalan kekerasan bukan hanya menjadi momok bagi perempuan dan keluarga korban, namun juga menjadi aib bagi desa. Di Kabupaten Demak, advokasi terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh Puspita Bahari juga mendapat hambatan dari pemerintah desa. Masnuah menjelaskan bahwa perempuan nelayan miskin yang menjadi korban kekerasan harus diberikan akses layanan hukum gratis, dan untuk mendapatkan akses layanan hukum gratis perlu surat keterangan tidak mampu dari desa. Pada beberapa kasus yang didampingi oleh Puspita Bahari awalnya sulit untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa karena pihak desa menganggap jika ada kasus kekerasan yang dibawa ke ranah hukum, maka akan memalukan nama desa tersebut.

Salah satu kasus kekerasan yang pernah ditangani ialah kasus kekerasan fisik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri. Sang suami menginginkan anak perempuannya sekolah mengaji saja di pesantren sedangkan sang istri ingin anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga nelayan. Selain itu ada juga kasus penelantaran ekonomi yang diadvokasi oleh Puspita Bahari. Menurut Masnuah pemicu utama kekerasan yang terjadi di keluarga nelayan ialah karena faktor ekonomi. Hak untuk memutuskan segala hal di dalam rumah tangga masih dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki suara dan pendapatnya tidak dihargai.

Temuan kasus kekerasan yang semakin banyak dan minimnya kesadaran perempuan nelayan membuat Masnuah berpikir bahwa persoalan kekerasan adalah masalah utama perempuan nelayan yang akar persoalannya bukan hanya pada cara pandang masyarakat tapi juga pada minimnya kesadaran akan hak dasar manusia pada diri perempuan itu sendiri. Dengan fakta tersebut, Puspita Bahari pun menjalin kerjasama dengan LBH Apik Semarang untuk mendirikan Sekolah Pelopor Keadilan. Untuk itu, selain melakukan pemberdayaan ekonomi dan advokasi kasus, Puspita Bahari melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran hak dan pencerdasan masyarakat melalui Sekolah Pelopor

Keadilan yang difasilitasi oleh LBH Apik Semarang yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kritis kepada perempuan nelayan di Demak. Di Sekolah Pelopor Keadilan para perempuan diajari tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, perbedaan seks dan gender, cara mengakses layanan publik, cara menulis surat ke instansi pemerintah, dan cara melapor ketika menjadi korban atau pendamping kasus kekerasan. Menurutnya perempuan perlu diberikan informasi hukum melalui kegiatan-kegiatan formal maupun informal. Selama ini Puspita Bahari melalui Sekolah Pelopor Keadilan juga turut mengampanyekan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.

Penghargaan, Proses dan Pengharapan

Penghargaan demi penghargaan datang kepada Masnuah dan Puspita Bahari sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukan. Penghargaan yang pertama diperoleh yaitu Kusala Swadaya di tahun 2011, Puspita Bahari mendapat penghargaan untuk kategori kelompok wirausaha sosial dari Yayasan Bina Swadaya. Kemudian penghargaan lain menyusul di tahun 2012 yaitu "Bukan Perempuan Biasa" dari Kick Andy Metro TV, tahun 2013 Tupperware Award She Can Wanita Inspirasi. Pada 27 September 2014 Puspita Bahari mendapat penghargaan Frans Seda Award di bidang pejuang kemanusiaan dari Unika Atma Jaya. Bagi Masnuah setiap penghargaan memiliki kesannya masing-masing. Namun ia mengungkapkan bahwa ada rasa putus asa ketika masuk nominasi Frans Seda Award. Pada saat penilaian lapangan oleh juri, ada ujaran negatif yang dilontarkan tokoh agama kepada juri yaitu "Puspita Bahari itu nggak ada manfaatnya, organisasi perempuan yang tak sewajarnya". Namun siapa sangka ternyata Puspita Bahari meraih penghargaan tersebut untuk kategori kemanusiaan. Menurut Masnuah, alasan juri memilih Puspita Bahari adalah karena ujaran negatif tersebut membuktikan bahwa ada tantangan besar yang harus dihadapi Masnuah dan Puspita Bahari selama ini, dan perjuangan mereka selama ini sangatlah keras dan penuh keberanian. Bagaimana Puspita Bahari bertahan dan tidak pernah lelah memberikan kesejahteraan kepada perempuan nelayan adalah hal yang patut diapresiasi. Masnuah sangat berterima kasih kepada Alm. Slamet Effendy Yusuf yang waktu itu menjadi salah satu juri. Masih di tahun 2014 Masnuah terpilih menjadi Ashoka Global Fellowship, ia mendapatkan tunjangan hidup atau beasiswa pengembangan diri selama 3 tahun. Ia terpilih karena dinilai telah membawa perubahan dan kemajuan bagi perempuan nelayan

melalui wirausaha sosial, mengurangi angka kekerasan dan memberikan pendidikan kesetaraan gender kepada perempuan di pesisir. Di tahun 2015 Masnuah masuk nominasi Liputan 6 SCTV Award dalam kategori pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan. Sulit untuk memisahkan antara nama Masnuah dengan Puspita Bahari, keduanya seperti ibu dan anak, penghargaan bagi Masnuah ialah juga penghargaan untuk Puspita Bahari, begitu pula sebaliknya. Sebagian dana yang didapat dari penghargaan maupun beasiswa Ashoka Global Fellowship ia hibahkan untuk membangun sekretariat Puspita Bahari di Desa Morodemak.

Bagi Masnuah setiap perjalanannya bersama Puspita Bahari selalu mengesankan, perjuangan yang dilakukan bersama-sama selalu meneguhkan, setiap kesakitan akan hilang bersamaan dengan waktu. Menurutnya mimpi akan lebih indah jika dibangun dan diwujudkan bersama. Di tahun 2014, mimpi yang dibangun bersama bisa diwujudkan, yaitu Rumah Puspita Bahari. Masnuah menceritakan bahwa pada tahun 2012 ia dan beberapa kader Puspita Bahari mengikuti pelatihan kepemimpinan, pada pelatihan tersebut peserta harus menuliskan mimpi mereka untuk organisasi di papan mimpi, PPNI Demak dan Puspita Bahari menulis di papan mimpi mereka yaitu Rumah Puspita Bahari. Selama ini kegiatan Puspita Bahari dilakukan di rumah para kader secara bergantian, Masnuah dan kawan-kawan ingin sekali ada semacam ruangan serba guna untuk setiap kegiatan, sebagai rumah aman bagi perempuan korban. Pada kurun waktu 3 tahun mimpi itu terwujud, di tahun 2014 Puspita Bahari dapat membangun rumah mereka dengan dana penghargaan yang didapat. Bagi Masnuah dan Puspita Bahari, rumah tersebut adalah harga diri mereka yang dengan susah payah diperjuangkan. Kini berbagai kegiatan organisasi dilakukan di rumah Puspita Bahari, mulai dari rapat kerja hingga pelatihan-pelatihan.

Mengenal sosok Masnuah membuat saya teringat pada ucapan Malala Yousafzai—aktivis perempuan muda Pakistan yang gigih memperjuangkan hak-hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan di tempat asalnya ketika Taliban melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah—berikut: *"I raise up my voice-not so I can shout but so that those without a voice can be heard... we cannot succeed when half of us are held back."* ("Saya meninggikan suara-bukan untuk berteriak, tapi supaya mereka yang tanpa suara dapat didengar...kita tidak dapat berhasil ketika separuh dari kita ditahan.") Pesan Malala Yousafzai di atas sangat kuat, dan seperti yang selama ini dilakukan Masnuah, menyuarakan suara perempuan nelayan yang tak dapat bersuara hingga

mereka akhirnya didengar oleh masyarakat dan negara. Masnuah mengakui kemampuannya berbicara di depan umum, mengadvokasi dan memberikan pelatihan bukanlah hal yang instan. Ia memaksa dan menguatkan dirinya untuk berani berbicara dengan satu semangat yaitu untuk mewakili suara-suara perempuan pesisir. Ia menceritakan hal-hal yang dialami oleh perempuan nelayan kepada publik, soal kemiskinan, kekerasan, dan ketidakberdayaan mereka. Ia yakin bahwa menarasikan tragedi adalah salah satu cara untuk memperbaiki tragedi tersebut di masa yang akan datang. Bagi dirinya, perempuan yang hanya lulusan sekolah dasar, tidak terpikir untuk bisa melakukan advokasi, pelatihan dan pemberdayaan, itu semua jauh dari pikirannya. Semangatnya terpercik karena pada awalnya ia geram melihat kondisi perempuan di masyarakat pesisir yang sangat marginal, ia marah pada semua tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki pada perempuan, ia kecewa pada negara yang seolah menutup mata pada kemiskinan perempuan dan anak perempuan di pesisir. Tekadnya bulat yaitu untuk membuat kondisi perempuan nelayan lebih baik dan sejahtera. Menurutnya berapapun penghargaan yang telah didapat untuk dirinya dan Puspita Bahari selama hal itu bukanlah menjadi tujuan akhir, maka perjuangan belumlah selesai.

Pentingnya Pengakuan bagi Perempuan Nelayan

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengetahui dan mengakui keberadaan perempuan nelayan sebagai agen ekonomi masyarakat pesisir. Mayoritas dari kita masih menganggap bahwa 1) tidak ada perempuan nelayan, yang ada hanyalah istri nelayan, 2) perempuan pengolah dan pemasar hasil tangkapan nelayan bukanlah seorang nelayan, 3) tidak ada perempuan yang pergi melaut. Namun menurut Masnuah, perempuan nelayan adalah mereka yang melakukan aktivitas di sektor perikanan mulai dari proses penangkapan hingga pemasaran. Menurutnya kategori perempuan nelayan pun luas, mencakup perempuan penangkap ikan di laut, perempuan nelayan pembudidaya, petambak garam, bahkan perempuan nelayan pengolah dan pemasar hasil produksi perikanan. Ia sendiri sebagai anak nelayan sedari kecil sudah ikut dalam pengolahan mengeringkan ikan, ia bekerja di pengusaha-pengusaha yang mengolah ikan. Untuk itu menurutnya definisi perempuan nelayan perlu dihadirkan dan diperluas konteksnya, karena seringkali jika perempuan disebut sebagai istri nelayan muncul anggapan bahwa ia tidak melakukan aktivitas ekonomi, padahal sebenarnya jika dihitung-hitung perempuan telah lama berkontribusi dalam rantai produksi perikanan.

Masnuah bersama Puspita Bahari dan PPNI sedang melakukan advokasi terkait pengakuan profesi perempuan sebagai nelayan secara administratif. Secara sosial, di Kabupaten Demak sendiri sudah ada pengakuan bahwa ada perempuan yang pergi melaut, namun meski demikian perempuan nelayan yang pergi melaut tersebut belum dapat mengubah profesinya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai nelayan. Masnuah mengawali advokasinya dari Demak, yaitu dengan berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pengakuan terhadap kerja-kerja perempuan nelayan dengan memberikan kartu nelayan adalah kebutuhan strategis bagi perempuan nelayan. Masnuah mengungkapkan bahwa ia cukup *respect* dengan kepemimpinan Susi Pudjiastuti, namun menurutnya Susi Pudjiastuti juga perlu melihat kerja-kerja perempuan nelayan selama ini. UU No. 7 tahun 2016 masih belum mengakomodasi perempuan nelayan, sehingga menurut Masnuah secara administratif perempuan sulit untuk membuat kartu nelayan dan asuransi nelayan. Dengan demikian perempuan nelayan tidak dapat mengakses bantuan yang selama ini hanya dapat diakses nelayan laki-laki. Masnuah yakin bahwa Susi Pudjiastuti tahu betul tentang keberadaan perempuan nelayan karena ia sendiri adalah bukti eksistensi perempuan nelayan.

Konsistensi dalam Perjuangan

Dua belas tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Puspita Bahari untuk berjuang, dan bukan juga waktu yang sia-sia bagi hidup Mbak Nuk. Pelabelan negatif dari masyarakat terhadap sosok Mbak Nuk sudah menjadi makanan sehari-hari, meski demikian penghargaan dan apresiasi menjadi pengobatannya. Bagi Mbak Nuk tidak ada kata selesai dalam perjuangan, meski apa yang selama ini dilakukan Puspita Bahari sedikit demi sedikit telah memperlihatkan hasilnya, namun persoalan demi persoalan juga turut membuntuti. Setelah selesai dengan pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan dan kekerasan, Puspita Bahari harus memperjuangkan hak perempuan nelayan untuk diakui sebagai nelayan. Sepanjang Tahun 2017, Mbak Nuk bersama kawan-kawan Puspita Bahari dan PPNI mengadvokasi pengakuan atas perempuan nelayan.

Ia mengungkapkan bahwa jika ia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ia ingin menyampaikan bahwa kemajuan ekonomi dari sektor perikanan bukan hanya kontribusi

laki-laki namun juga perempuan, sehingga ia sangat ingin perempuan nelayan diberikan pengakuan, identitas, dan akses sebagai nelayan sama halnya dengan laki-laki selama ini. Secara praktis keinginannya ialah adanya kartu nelayan dan asuransi nelayan untuk perempuan nelayan di seluruh Indonesia.

Perjuangan Masnuah selama ini juga ia tularkan kepada anak laki-lakinya. Ia menceritakan bahwa anak laki-lakinya selama ini ia ajarkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, menyapu. Menurutnya penghargaan terhadap perempuan dan kesetaraan gender perlu diajarkan kepada laki-laki sedini mungkin, meskipun ia mengakui baru sempat mengajarkan anak laki-lakinya setelah 10 tahun tidak bertemu. Anak laki-lakinya sebelumnya tinggal dan menyelesaikan gelar S1 di Batam, kini mereka berdua telah kembali tinggal bersama, sehingga Masnuah baru mulai mengajarkan tentang kesetaraan gender.

Menurutnya mengajarkan anak laki-laki melakukan kerja domestik adalah cara termudah untuk mengajari anak tentang kesetaraan gender. Nilai-nilai yang bisa dipetik ialah bahwa pekerjaan domestik bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, menyenangkan hati istri bukan hanya dengan memberikan nafkah materi tapi juga menghargai pendapatnya, berbagi dalam pekerjaan domestik dan yang terpenting tidak melakukan kekerasan.

Masnuah mengakui bertahun-tahun konsisten dalam perjuangan bukanlah perjalanan yang mudah. Ia sendiri pernah mengalami titik jenuh ketika tidak ada dukungan sama sekali dari masyarakat. Pada waktu itu ia merasa perjuangannya telah selesai, ia putus asa. Namun berkat berbagi cerita dengan kawan sejawat dan rekan-rekan di jaringan, ia pun berusaha bangkit lagi dengan mengingat kembali tujuan awal ia mendirikan Puspita Bahari, yaitu untuk menyejahterakan perempuan nelayan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

